

Konsep Pemimpin Negara: Pandangan al-Baqillani

Oleh Much Hasan Darajat*

Muqaddimah

Theologi Ash'ari merupakan salah satu theologi yang paling banyak diterima di kalangan umat Islam hingga saat ini. Hal ini karena adanya penerapan metode dalam memahami agama yang dilakukan secara fleksibel dan tidak kaku. Golongan ini ada pada posisi pertengahan (*al wasi-thiyyah*) di antara golongan Hanbali dan Mu'tazilah. Cara Ash'ari dalam berteologi lebih mengedepankan wahyu dan sekaligus secara rasional menggunakan kekritisan berpikir sehingga ini tidak bersandarkan kepada wahyu saja tanpa adanya menggunakan akal, sebagaimana aliran pengikut Imam Ahmad ibn Hanbal, akan tetapi tidak juga mengedepankan akal daripada wahyu, seperti yang terjadi pada golongan Mu'tazilah. Pengasas aliran ini, Abu Hasan al Ash'ari, mampu menggabungkan dua perbedaan mendasar yang terjadi di antara sekte-sekte yang ada saat itu. Ide-ide dasar beliau ini secara aktif dikembangkan oleh para pengikutnya.

Salah seorang tokoh yang cukup berjasa mengembangkan pemikiran Ash'ari adalah Abu Bakar ibn Tayyib al-Baqillani.

Ia banyak melakukan pengembangan yang mendasar dalam beberapa aspek penting salah satunya dalam hal metafisik sebagaimana digambarkan oleh Ibn khaldun.¹ Selain itu, ia juga berhasil menggabungkan dua konsep penting dalam ilmu kalam; *Jalil Kalam* (konsep-konsep yang membahas tentang metafisik dan sifat-sifat Allah) dan *Daqiq Kalam* (konsep-konsep yang membahas tentang filsafat alam).² Maka dari itu, tidak heran sebagai seorang teolog ia disebut juga sebagai seorang filosof alam.³ Di samping itu, tokoh ini dalam beberapa karyanya membahas juga tentang konsep politik. Hal ini ditulisnya sebagai respon terhadap para penguasa Syiah saat itu yang mengatur administrasi Dinasti Abbasiyah. Al-Baqillani adalah salah satu tokoh sunni yang bereaksi, melalui karyanya, terhadap penguasa Syi'ah mendahului tokoh-tokoh lainnya seperti; Abdul Qahir al-Baghdadi⁴, Abu Ya'la⁵, dan al-Mawardi.⁶ Masalah politik ini akan menjadi kajian utama dalam makalah singkat ini.

Penulisan artikel ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran singkat pemi-

* Mahasiswa S2 International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC)-IIUM Malaysia.

1 Abdurrahman ibn Muhammad ibn Khaldun, *al Muqaddimah*, ed. Darwis al-Juwaidi, (Beirut: al Maktabah al Ashriyyah, 1996), hlm. 436.

2 Muhammad Ramadhan Abdullah, *al-Baqillani wa Ara'uhu al-Kalamiyyah*, (Baghdad: Mathbaatul Ummah, 1986), hlm. 603.

3 Seyyed Hussein Nasr, *Science and Civilization in Islam*, (Cambridge: The Islamic Texts Society, 1987), hlm. 127.

4 Lihat *Kitab Ushuluddin*, (Beirut: Dar al Kutub al-Ilmiyyah, 1981), hlm. 270-286.

5 Abu Ya'la Muhammad bin al-Husain al-Farra' al-Hanbali, *Al-Abkam al-Salimiyyah* ed. Muhammad Hamid al-Qaifi, (Beirut: Dar al Kutub al-Ilmiyyah, 2000).



- 6 Abu al-Hasan Ali bin Muhammad ibn Habib al-Basri al-Baghdadi al-Mawardi, *Al-Abkam al-Sultaniyyah*, (Beirut: Dar al Kutub al-Ilmiyyah).
- 7 Joseph Richard McCarthy ialah seorang orientalis pertama yang mengkaji secara serius tentang karya-karya al-Baqillani. Semua pendapat dan komentar terhadap tokoh ini ada dalam disertasi yang beliau tulis. Lihat *Al Baqillani: a Polemist and theologian*, (Oxford: Oxford University, 1951).
- 8 Lihat *The Political Doctrine of al Baqillani*, (Beirut: American University, 1966).
- 9 Ia menganggap beliau sekedar mengumpulkan ide-ide Ash'ari dan mempopulerkannya. Tidak ada yang original. Sebagaimana ia tulis "it seems to me, therefore, only just to conclude that al Baqillani really did play an important and significant part, by his lecturing, dictations, and writing, in establishing and "popularizing" of Ash'arism... he must have depended largely on the works of Ash'ari himself." Lihat *Al-Baqillani: a Polemist and theologian*, hlm. 315-316.
- 10 *Encyclopedia of Islam New Edition*, R. J. McCarthy, Al-Bakillani, (Leiden: Brill, 1986), vol. I, hal. 959.
- 11 Ibn Asakir menempatkan al-Baqillani sebagai salah seorang Mujaddid pada abad ke IV H setelah Umar bin Abdul Aziz, al-Shafi'i, dan al-Ash'ari. Lihat *Tabyin Kadhib al Muftari*, (Damascus: Matbaah al-Taufiq), hlm. 52-53; Demikian juga Ibn Taimiyyah menganggapnya sebagai tokoh Ash'ari terbaik yang tiadaandingannya sebelum dan sesudahnya. Sebagaimana dikutip oleh Yusuf Ibish dari bukunya *al-Aqidah al-Hamawiyyah*. Lihat *the Political Doctrine of al Baqillani*, (Beirut: American University, 1966). hlm. 6.

kiran al-Baqillani dalam hal kepemimpinan (*imamah*), dan mengambil pelajaran penting apa yang masih relevan untuk saat ini. Studi tentang tokoh As'hari ini masih sedikit dilakukan, khususnya berkenaan dengan masalah politik. Selama ini, sepengetahuan penulis ada dua karya yang membahas pemikirannya dalam konsep kepemimpinan. Pertama oleh seorang orientalis, Joseph Richard McCarthy,⁷ dan yang kedua oleh Yusuf Ibish.⁸ McCarthy selama bertahun-tahun meneliti pemikiran al-Baqillani berkesimpulan negatif dan kurang apresiatif terhadap tokoh ini.⁹ Kesimpulan yang dibuat, menurut penulis, nampaknya mengada-ada karena penelitiannya hanya disandarkan pada beberapa jumlah manuskrip, dan itupun tidak lengkap sebagaimana ia akui sendiri.¹⁰ Hal ini juga bertolak belakang dengan pendapat para ulama kita dahulu yang jauh menghargai dan menghormati al-Baqillani sebagai tokoh Ash'ari yang telah berjasa mengembangkan aliran ini.¹¹

Di samping itu, ada catatan penting buat orientalis ini, karena ia telah mengedit salah satu karya al-Baqillani *Kitab al-Tambid* dan dengan sengaja menyingkalkan satu bab penting yang berkaitan dengan *imamah*, meskipun ia memberikan beberapa alasan. Namun, menurut penulis, alasannya tidak tepat. Ia menyatakan bahwa karena hal itu tidak berkenaan dengan aqidah, maka tidak harus dimasukkan dalam salah satu judul pembahasan dalam buku itu, dan ada pembahasan sendiri yang lebih luas.¹² Bagaimanapun juga, bab ini adalah masalah bid'ah dalam aqidah yang diyakini oleh orang-orang Syi'ah, dan menjadi salah satu rukun iman mereka.¹³ Maka dari itu, kalau dibahas dalam bab aqidah akan sangat tepat, karena menjelaskan kedudukan *imamah* yang sebenarnya. Abdul Qahir Thahir al-Baghdadi juga membahasnya dalam *Kitab Ushuluddin*. Apabila buku editan McCarthy ini dibandingkan dengan edisi-edisi

lain yang diedit oleh orang-orang Islam, maka nampak perbedaannya dalam hal kelengkapan pembahasan khususnya masalah di atas. Sementara al-Baqillani juga berkomentar di dalam buku itu bahwa dirinya merangkum pokok-pokok pikirannya tentang *imamah* dipersembahkan untuk penguasa saat itu.¹⁴ Dengan demikian kita patut mempertanyakan apa motif editor sebenarnya dari penghilangan judul itu.

Adapun Yusuf Ibish, alumnus American University Beirut, meneliti pemikiran al-Baqillani tentang kepemimpinan (*imamah*) berdasarkan satu karya saja, *Kitab al-Tambid*. Meskipun demikian, ia mampu memberikan gambaran yang bagus tentang pemikiran politiknya. Dalam makalah ini penulis mengupas pemikiran politik al-Baqillani yang tertuang dalam dua karyanya: pertama *Kitab al-Tambid*,¹⁵ dan kedua *Kitab Manaqib al-A'immah al-Arba'ah*.¹⁶ Sebelum membahas konsep al-Baqillani tentang kepemimpinan, untuk lebih jelasnya berikut dibahas perjalanan hidupnya dan situasi politik di zamannya.

Biografi al-Baqillani

Riwayat hidup al-Baqillani telah banyak diulas para peneliti. Namun mengenai tahun maupun tempat kelahiran tokoh ini beberapa sumber terdiam.¹⁷ Sebagian hanya memperkirakan bahwa ia dilahirkan pada paruh kedua abad keempat hijriyah. Namun, dalam salah satu karyanya disebutkan bahwa ia lahir di Basrah pada tahun 338 H/950 M,¹⁸ dan meninggal di Baghdad pada 23 Dzulqadah 403 H/5 Juni 1013 M, dikuburkan bersebelahan dengan Imam Ahmad ibn Hanbal. Perkembangan intelektual tokoh ini cukup beragam. Ia berguru pada Abu Bakr ibn Malik al-Qati'i, Abu Muhammad ibn Masi, dan Abu Ahmad al-Husaini ibn Ali al-Naisaburi tentang hadis.¹⁹ Adapun tentang ilmu Kalam beliau belajar dari Abu Abdullah

Muhammad ibn Ahmad ibn Mujahid al-Ta'i (salah satu murid Abu Hasan al-Ash'ari). Beliau juga belajar fiqih dari Ali Abi Bakr al-Abhari, salah seorang tokoh madzhab Maliki di Baghdad.²⁰ Pada kesempatan lain, bersama Abu Ishaq al-Isfiraini dan Ibn Furaq, ia belajar kepada Abu Hasan al-Bahili al-Basri (juga salah satu murid Abu Hasan al-Ash'ari).²¹ Dengan demikian al-Baqillani bukanlah murid langsung dari Ash'ari, akan tetapi ia belajar dari murid-muridnya yang telah aktif mengajarkan ajaran teologi Ash'ari dan mengembangkannya.

Tokoh Ash'ari ini memiliki banyak karya tulis yang berkaitan dengan berbagai bidang. Selama hidupnya ia sangat aktif dengan kegiatan keilmuan. Dalam setiap malam beliau mampu menulis kira-kira sebanyak 35 halaman dari hafalannya. Tidak hanya itu, beliau pun juga ketika malam melakukan shalat 20 rakaat baik dalam perjalanan ataupun tidak.²² Di antara karya-karyanya yang sampai kepada kita sekarang antara lain: al-Tamhid, I'jaz al-Qur'an,²³ Manaqib al-Aimmah al-Arba'ah, al-Inshaf,²⁴ dan al-Taqrīb wa al-Irsyād.²⁵

Al-Baqillani merupakan salah satu teolog ulung pada zamannya. Dalam berargumentasi ia memiliki ide yang cemerlang, lisan yang fasih, kejelasan argumen, dan keindahan dalam berartikulasi. Beliau merupakan satu-satunya tokoh sunni yang diundang ke istana oleh 'Adud Daulah dan berdebat langsung dengan para tokoh Mu'tazilah.²⁶ Di lain kesempatan, ia pernah diutus oleh 'Adud Daulah sebagai diplomat ke Bizantium untuk berdakwah kepada Raja Romawi Basil II dua kali. Dalam perjalanan ini ia membawa misi dari raja yang memohon kepada Basil agar beberapa daerah yang telah dikalahkan oleh Nicheporus Phocas dan John Tzimiskes untuk dikembalikan dengan cara saling bertukar tawanan. Akan tetapi, Basil II menolak permintaan itu.

Selain membawa misi ini, al-Baqillani juga berdebat dengan para teolog Kristen yang dilakukan di istana Basil. Saat itu, ia dengan tegas menolak perintah untuk mencium tanah di hadapan raja.²⁷ Sikap yang demikian ini menjadikannya lebih disegani baik oleh kawan ataupun lawan dalam berbagai polemiknya.

Latar Belakang Politik Semasa Al-Baqillani Hidup

Konsep kepemimpinan al-Baqillani tidak dapat dilepaskan dari latar belakang kondisi politik yang terjadi saat itu. Sebagaimana diungkapkan di atas bahwa ide-idenya sebagai respon terhadap situasi yang terjadi saat itu. Ia hidup pada saat Dinasti Abbasiyah melemah dibawah kekuasaan Bani Buwaihi yang memiliki aqidah Syi'ah. Dinasti ini salah satu yang terpenting dari beberapa dinasti yang ada di dataran tinggi Iran, berdekatan dengan Dinasti Samaniah di Khurasan dan Transoxiana. Buwaihi berasal dari nama Buwaih atau Buyeh, nama seorang ayah dari tiga bersaudara;



Al-Baqillani lahir di Basrah pada tahun 338 H/950 M,¹⁸ dan meninggal di Baghdad pada 23 Dzulqa'dah 403 H/5 Juni 1013 M, dikuburkan bersebelahan dengan Imam Ahmad ibn Hanbal



- 12 Al-Baqillani, *Kitab Tambid*, ed. McCharty (Beirut: al-Maktabah al-Syarqiyah, 1957), hlm. 21-23.
- 13 Lihat Ibn Khaldun, *Muqaddimah*, hlm. 435.
- 14 Al-Baqillani, *al-Tambid*, hlm. 433.
- 15 Abu Bakr Muhammad ibn Tayyib al Baqillani, *Kitab Tambid*, ed. Imaduddin Ahmad Haidar, (Beirut: Muassasah al Kutub al Tsaqafah, 1987).
- 16 Abu Bakr Muhammad ibn Tayyib al Baqillani, *Kitab Manaqib al-Aimmah al-Arba'ah*, ed. Samira Farhat, (Beirut: Dar al-Muntakhab al Arabi, 2002). Berikutnya disingkat *manaqib*.
- 17 Abi al Abbas Ahmad ibn Muhammad Ibn Ibrahim Abu Bakr Ibn Khalikan, *Wafayat A'yan*, ed. Yusuf Ali Thawil & Maryam Ali Thawil (Beirut: Dar al Kutub al 'ilmiyyah, 1998), Vol. 4, hlm. 98 ; Shamsuddin Muhammad ibn Ahmad ibn Uthman al Dhahabi, *Siyar a'lam al Nubala*, ed. Ibrahim al Zaibaq, (Beirut: Muassasah al Risalah, 2001), vol. 15, hlm. 190-193; Abu Bakar Ahmad ibn Ali al Khatib al Baghdadi, *Tarikh Baghdad* (Beirut: Dar al Kutub al 'ilmiyyah), hlm. 379-383.
- 18 Baqillani, *al Inshaf*, ed. Imaduddin Ahmad Haidar, ('Alim al Kutub, 1986), hlm. 7.
- 19 *Tabyin Kadhīb al Muftari*, Abu al Qasim Ali Ibn Hasan ibn Hibatullah ibn Asakir al Damasyqi, (Damascus: 1988), 217.
- 20 Yusuf Ibish, *The Political Doctrine of Baqillani*, hlm. 6.
- 21 Al Baqillani, *Taqrib wa al Irsyad* (Beirut: al Resalah, 1998), hlm. 28-29.
- 22 Abu Bakar Ahmad ibn Ali al Khatib al Baghdadi, *Tarikh Baghdad* (Beirut: Dar al Kutub al 'ilmiyyah), Hlm. 380.
- 23 Kitab ini membahas tentang keistimewaan al Qur'an.

- 24 Kitab ini berkaitan dengan penolakannya terhadap aliran-aliran sesat seperti al Rafidah, Mu'tazilah, al Juhmiyyah, Khawarij, Syi'ah dan lain-lainnya.
- 25 Kitab ini membicarakan masalah Ushuliyah.
- 26 Muhammad Ramadhan Abdullah, *al Baqillani wa Arauh al Kalamiyah*, hlm. 158.
- 27 Joel L. Kraemer, *Philosophy in the Renaissance of Islam*, (Leiden: E. J. Brill, 1986), 78-79; H. F. Amedroz, *An Embassy from Baghdad to The Emperor Basil II*, *Journal of Royal Asiatic Society (JRAS)* 1914.
- 28 *Encyclopedia Islam*, new edition, *Buwaihids*, 1355-1357.
- 29 *Ibid*.
- 30 Philip K. Hitti, *History of the Arabs*, (London: MacMillan and Co. Limited, 1937), hlm. 470.
- 31 A. H. Siddiqi, *Caliphate and Kingship in Medieval Persia, Islamic Culture*, vol. 9, 1936, 109-110.
- 32 Adam Mez, *Renaissance of Islam*, trans. Salahuddin Khuda & D.S. Margoliouth, (London: Luzac & CO., 1937), hlm. 11.
- 33 A. H. Siddiqi, *Caliphate and Kingship*, hlm. 109.
- 34 *El, Buwaihids*, hlm. 1351.
- 35 Hal ini nampak pada saat permintaan 'Adud Daulah terhadap seorang Qadi untuk menambah daftar saksi sebagai dukungan kepentingan tentaranya. Namun, permintaan ini direspon dengan penolakan bahwa pencantuman saksi adalah murni urusan Qadi. Lihat *The Renaissance of Islam*, hlm. 228.
- 36 A. H. Siddiqi, *Caliphate and Kingship*, 119-120.

Ali, Hasan, dan Ahmad, yang mendirikan dinasti ini. Bani Buwaihi adalah termasuk dari suku Dailamah yang pada saat itu memiliki jumlah tentara yang besar di daerah dunia timur Islam.²⁸

Suku ini tinggal di Dailam yang memiliki hampir semua wilayah dan dikuasai oleh orang-orang Syi'ah. Abu Shuja' Buwaihi, ayah tiga bersaudara tersebut, adalah seorang pemimpin dari gerombolan suku yang suka berperang di penguasaan Dailam, bersama Makan bin Kaki pada awalnya mengabdikan kepada Dinasti Samaniah lalu ke sekutunya Jilani Mardawij.²⁹ Buwaihi mengklaim bahwa dirinya adalah keturunan dari raja Sasania kuno. Boleh jadi dengan klaim ini ditujukan untuk memperkuat martabat dinasti ini berikutnya.³⁰ Tak lama dalam pengabdianya kemudian Buwaihi melepaskan diri dari kelompok Mardawij dan mampu menguasai beberapa wilayah Isfahan, Shiraz, Ahwaz dan Kirman. Hingga Mardawij meninggal wilayah tersebut masih dalam kekuasaan Bani Buwaihi. Dari penguasaan daerah tersebut, Buwaihi dapat otoritas pemerintahan di propinsi yang diakui oleh Khalifah Abbasiyah, al Mustakfi (944-946). Pada tahun 334/945, setelah melalui lobi politik kepada beberapa dinasti besar lainnya; Hamadan, Qaramithah dan Barid,³¹ Ahmad, salah satu dari tiga bersaudara, berhasil masuk Baghdad dan menguasai kekhalifahan Abbasiyah, dan berikutnya menjadi pemerintahan boneka yang diatur oleh Bani Buwaihi hingga tahun 1055. Keberhasilan Ahmad ini dapat dilakukan dengan mendeklarasikan statusnya sebagai *amir al umara*, yang mengatur seluruh amir Bani Buwaihi. Pada saat itu, al-Mustakfi, sambil menitikkan air mata, mengalah tanpa syarat kepada Bani Buwaihi.³² Dengan motif politik, Ahmad menyatakan kesetiannya kepada Khalifah al-Mustakfi dan menatapkan posisi Khalifah, hanya saja semua otoritas di bawah komando Ahmad.

Sebagai golongan Syi'ah, Bani Buwaihi tidak mengakui kekhalifahan Abbasiyah, bahkan menganggapnya sebagai 'perampas.'³³ Karena dalam aqidah Syi'ah pemimpin adalah dari golongan mereka, dimulai dengan Ali bin Abi Thalib sebagai penerus utama setelah meninggalnya Rasulullah saw.

Era baru ini memberikan kebebasan Bani Buwaihi untuk memaksa khalifah menganugerahkan gelar Bani Buwaihi: Ahmad, Ali, dan Hasan menjadi bergelar Muiz al-Daulah, 'Imad al-Daulah, dan Rukn al-Daulah. Tak beberapa lama, Ali bin Buwaihi meninggal tanpa ada keturunan. Daerah kekuasaannya dipegang oleh 'Adud Daulah putra dari Hasan bin Buwaihi (Rukn al-Daulah). Ketika ayah dan pamannya, Ahmad bin Buwaihi meninggal 'Adud Daulah mendapatkan dirinya sebagai kepala keluarga yang memegang hampir seluruh wilayah.³⁴

Di antara kekuasaan yang dimiliki khalifah pada masa itu adalah dalam hal aspek keagamaan. jabatan Qadi juga ditunjuk langsung oleh khalifah meskipun pada kenyataannya banyak kebijakan berkenaan administrasi kantor Qadi diintervensi oleh para pemimpin Buwaihi. Selain itu, para Qadi yang statusnya memang dipilih oleh Khalifah menjalankan tugasnya dengan di bawah ancaman para Amir Bani Buwaihi. Meskipun para Qadi memiliki status independensi yang tinggi dan sulit untuk diintervensi oleh kekuasaan,³⁵ namun secara politis mereka hidup dalam tekanan. Tidak hanya imbalan sebagai Qadi yang kurang mencukupi, tapi tidak jarang di antara mereka menjadi bahan olok-olokan oleh para Amir Bani Buwaihi yang tidak sepatutnya dengan keputusannya. Bahkan, di antaranya ada yang dilepaskan dari statusnya.³⁶

Dalam berbagai urusan politik banyak dilakukan oleh para amir Buwaihi tidak jarang harus ada tanda tangan nama khalifah sebagai orang yang

bertanggungjawab. Demikian pula, nama khalifah juga dicantumkan dalam korespondensi penting dengan beberapa gubernur yang memimpin propinsi serta urusan-urusan yang berkenaan dengan berbagai hal. Disini, peran khalifah sekedar memberi tanda tangan dan stempel, tanpa harus mengetahui masalah yang terjadi.³⁷ Administrasi dan keperluan harian Khalifah al Mustakfi dijatah oleh Amir Bani Buwaihi dengan sejumlah uang sebanyak lima ribu dirham. Namun, jumlah itu pada periode kekhalifahan berikutnya, Khalifah al Muti', dikurangi menjadi dua ribu dirham.³⁸ Selain itu, Bani Buwaihi juga memonopoli koin uang yang berlaku saat itu. Julukan "amirul mu'minin" yang biasanya disebutkan setelah nama khalifah dalam koin itu dihilangkan, dan diganti dengan nama Amir umara disertai titel pemimpin Bani Buwaihi.³⁹

Selain itu, khutbah jum'at dan forum-forum resmi lainnya dijadikan simbol politik untuk menyuarakan kepentingan para penguasa. Di sini, Amir Bani Buwaihi juga memaksakan agar dalam forum itu nama Amir Umara dan keluarganya harus disebutkan juga selain dari penyebutan nama khalifah.⁴⁰ Para imam masjid bertanggungjawab langsung terhadap khalifah untuk menjaga kestabilan kegiatan masjid dan menghindari adanya bid'ah, juga memiliki pesan menyampaikan kepentingan khalifah.⁴¹ Dengan demikian, mereka berperan cukup penting dalam menyebarkan pesan politik dari para penguasa.

Theologi Syi'ah yang diyakini oleh Bani Buwaihi telah berpengaruh ke berbagai aspek, aqidah, syariah dan politik. Dengan demikian sebagian besar kebijakan yang dibawapun untuk kepentingan golongan orang-orang yang memiliki doktrin yang sama. Wilayah timur Parsi sepenuhnya dikuasai oleh Dinasti ini. Afrika utara dikuasai oleh Bani Fathimiyah. Syria, dan Mesopotamia dikuasai

oleh Bani Hamadan. Mesir oleh Dinasti Ikhshid,⁴² dan kekuasaan Qaramithah di Bahrain. Semua dinasti ini, kecuali Ikhshid, adalah beraliran Syi'ah.⁴³ Dengan begitu luasnya kekuasaan Syiah saat itu, menjadikan orang-orang Suni untuk bangkit memprotes kekuasaan mereka. Demikianlah latar belakang kehidupan politik al-Baqillani yang memberinya inspirasi untuk merespon baik secara lisan ataupun tulisan.

Kepemimpinan Dalam Islam

Pada prinsipnya konsep kepemimpinan dalam Islam sudah ada sejak Rasulullah saw. Rujukan utama dalam menentukan kebijakan publik telah dijelaskan secara umum dalam al-Quran dan hadis. Namun, hal-hal teknis yang berkenaan dengan penggantian kepemimpinan perlu adanya analisa dan metode pendekatan yang dipakai untuk memahami kedua teks di atas. Pendekatan al-Baqillani yang dipakai untuk memaparkan ide kepemimpinannya menggunakan lima hal, tidak seperti layaknya ulama suni yang lain, yaitu: al-Quran, hadis, ijma', qiyas, dan hujjah akal.⁴⁴ Dengan bersandarkan metode tersebut, fondasi ide yang dibangun akan lebih kokoh dibandingkan dengan hanya melalui pendekatan al-Quran dan hadis saja.

Dasar epistemologi yang menjadi sandaran pembahasan konsep kepemimpinan ini, menurut al-Baqillani, melalui dua jalur, yaitu dari informasi valid banyak orang (*al-khabar al-mutawatir*) dan informasi satu orang (*al-khabar al-wahid*). Yang pertama, bahwa konsep kepemimpinan diriwayatkan oleh banyak riwayat yang mana memiliki tingkat otentisitas yang tinggi, sehingga informasi ini tidak mungkin adanya kesepakatan dalam kebohongan. Adapun yang kedua, konsep ini diriwayatkan oleh satu orang, yang mana apabila perawinya memiliki kredibilitas, apa yang diriwayatkan dapat

37 Ibid, 115.

38 Ibid, 110.

39 S. M. Stern, *Coin and Documents from the Medieval Middle East*. (London: Variorum Reprints, 1986), hlm. 257.

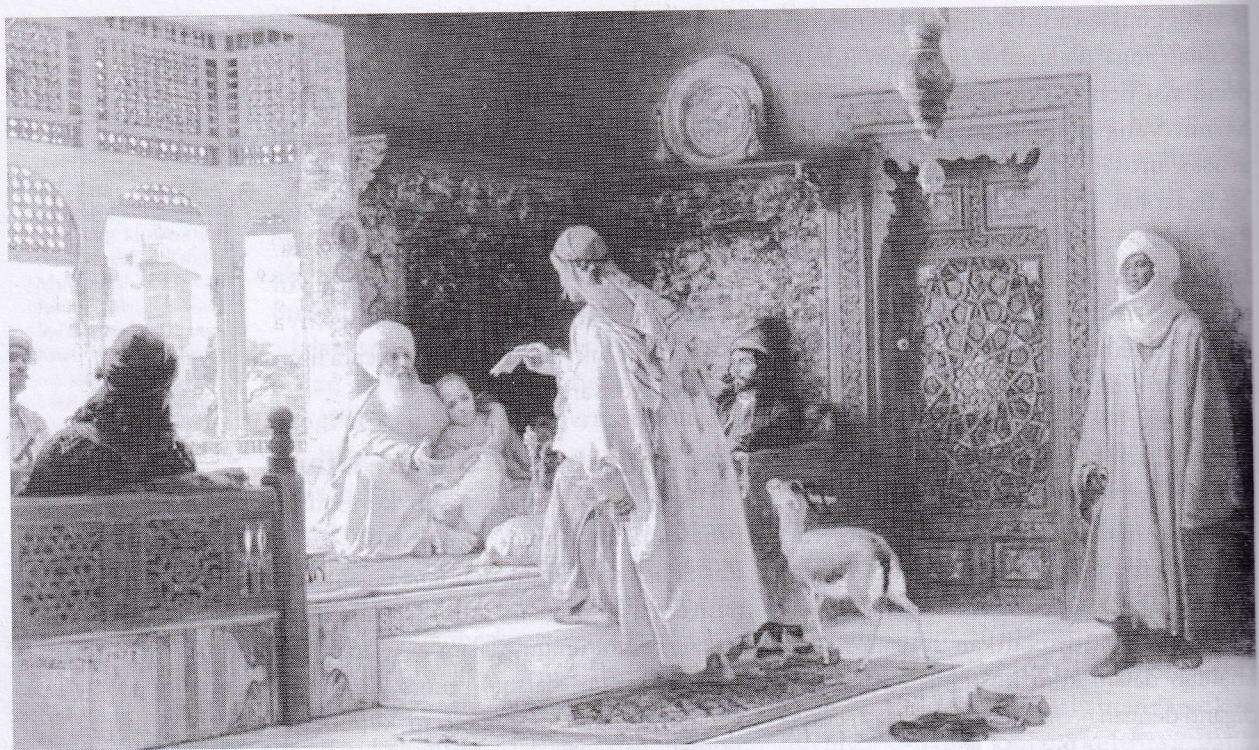
40 Muiz Daulah, sebagai orang syiah, pernah pada suatu ketika memaksakan untuk membuat tulisan yang besar ditempel di dinding masjid menyebutkan "semoga Allah melaknat Muawiyah bin Abi Sufyan, dan melaknat siapapun yang benci terhadap Fatimah karena peristiwa Fadak, dan siapapun yang melarang penguburan Hasan di samping kakeknya, Alaihis salam, dan yang menolak Abu Dzar al Ghifari, dan mengeluarkan Ibn Abbas dari dewan masjid. lihat *Caliphate and Kingship*, 111; Ibn al Athir, *al Kamil fi al Tarikh*, (Beirut: Dar al Fikr, 1978), vol. 7, hal. 4.

41 *Caliphate and Kingship*, hlm. 120.

42 El, Buwaihids, hlm. 418.

43 Yusuf Ibish, *Political Doctrine...*, hlm. 42.

44 Al Baqillani, *Al Insaf*, hlm. 30-32.



diamalkan. Dua jalur ini menggambarkan kondisi bagaimana terjadinya peralihan kepemimpinan pada empat khalifahan setelah meninggalnya Rasulullah saw yaitu Abu Bakr, Umar bin al-Khattab, Uthman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib yang sampai pada kita sekarang.⁴⁵ Menurut al-Baqillani, kepemimpinan dalam umat Islam harus ada karena beberapa alasan yang tidak bisa ditolak, seperti:

1. Untuk mengatur tentara guna membentengi ummat dari serangan musuh.
2. Untuk mengawasi ummat baik yang *dbalim* (berbuat kriminal) atau yang *madhum* (yang didhalimi).
3. Untuk menegakkan hukum.
4. Untuk membagi harta rampasan (*fa'i*) kepada ummat Islam.
5. Untuk mengamankan kaum muslimin dalam ibadah haji dan menyiapkan tentara guna mengawasi musuh.⁴⁶

Dalam hal ini al-Baqillani meyakini bahwa kepemimpinan ummat Islam

adalah sebuah keharusan sebagaimana adanya hukum. Sehingga dengan demikian proses kehidupan akan berjalan semestinya.

Karakter Pemimpin

Al-Baqillani menyebutkan bahwa seorang pemimpin harus memiliki karakter-karakter tertentu yang layak dijadikan sebagai seorang pemimpin. Diantaranya:

1. Pemimpin harus dari keturunan kaum Quraisy. Hal ini didasarkan pada hadis Rasul saw. yang menyebutkan "*al aimmatu min Quraisy*"⁴⁷ (pemimpin adalah dari kaum Quraisy). Selain itu, alasan ini disandarkan juga pada pendapat para sahabat Rasulullah baik kaum Anshar maupun Muhajirin yang menyepakati bahwa pemimpin umat Islam adalah dari kaum Quraisy.⁴⁸
2. Pemimpin harus berilmu yang nantinya bisa dijadikan pegangan pada saat memimpin. Diantaranya ilmu agama setingkat Qadi', ilmu pepe-

45 Al Baqillani, *Manaqib*, hlm. 32.

46 Al Baqillani, *Al Tambid*, hlm. 477-478.

47 Hadits riwayat Bukhari dalam Badruddin Abu Muhammad Mahmud ibn Ahmad, *Kitab Umdat al Qari Syarh Shahih Bukhari*, (Mesir: Matba'ah Mustafa al Babi al Halabi, 1972), vol. 20, hlm. 110.

48 Ibn Khaldun menyebutkan bahwa al Baqillani menyetujui akan adanya kepemimpinan yang datang bukan dari orang-orang Quraisy. Namun, penulis hingga saat ini belum menemukan bukti itu dalam kedua karyanya. Lihat *al Muqaddimah*, ed. Darwis al Juwaidi, (Beirut: al Maktabah al Ashriyyah, 1996), hlm. 181.

rangan untuk membentengi rakyat, ilmu manajemen dan administrasi untuk mengatur ummat.

3. Pemimpin harus punya keberanian dan ketahanan emosi untuk menegakkan hukum demi berjalannya keadilan dalam seluruh aspek.

Pemimpin tidak harus *maksum* (terjaga dari kesalahan), mengetahui hal yang ghaib, dan tidak juga mereka yang paling berani. Memilih pemimpin, menurut al-Baqillani, haruslah yang terbaik (*al-afdhul*) dari di antara yang ada. Namun, apabila terjadi ketidaksepakatan untuk memilih orang ini, maka boleh diambil dari yang terbaik yang memungkinkan (*al-mafdhul*).⁴⁹

Pemimpin Dipilih, Bukan Ditunjuk

Al-Baqillani menerangkan bahwa metode bagaimana seseorang dapat menjadi pemimpin. Kepemimpinan dapat terjadi dengan salah satu dari dua cara yaitu pemilihan (*ikhtiyar*) dan penunjukkan (*nash*). Apabila salah satu batal maka yang lain adalah yang sah. Hal ini terbukti Rasulullah saw. sendiri tidak menunjuk salah satu sahabat untuk memimpin umat Islam setelah meninggalnya, apabila beliau secara resmi telah menunjuk penggantinya tentu ada riwayat yang sampai kepada kita dan menjadi bukti tentang keabsahan penunjukkan dalam kepemimpinan.⁵⁰ Maka dari itu, secara historis penunjukan tidak punya rujukan dan tidak bisa dipraktekkan.

Al-Baqillani mengungkapkan bahwa hadis-hadis yang menjadi sandaran dalam keyakinan orang-orang Syi'ah adalah dalam standar hadis ahad, yang berlawanan dengan kesepakatan para sahabat generasi awal untuk taat kepada Abu Bakar sebagai pemimpin setelah Rasulullah. Kegagalan mereka dalam mengajukan bukti-bukti hadis, sebagai gantinya, mereka mengajukan konsep *taqiyah*⁵¹

untuk berargumentasi terhadap metode pemilihan (*ikhtiyar*) sebagai jalan untuk memilih kepemimpinan mereka.⁵²

Di antara hadis yang menjadi sandaran orang-orang Syi'ah, sebagaimana disebutkan oleh al-Baqillani, adalah hadis penunjukkan Rasulullah saw. Kepada Ali bin Abi Thalib sebagai penggantinya "man kuntu maulabu fa 'aliyyun maulabu."⁵³ (siapapun mengetahui bahwa aku adalah maula-nya, maka ia akan tahu bahwa Ali maula-nya). Arti *maula* di sini oleh orang-orang Syi'ah diartikan sebagai pemimpin. Dengan demikian Ali berhak menjadi seorang pemimpin setelah Rasulullah saw. dan harus ditaati.⁵⁴ Akan tetapi, menurut al-Baqillani pernyataan hadis itu bukanlah sebagai justifikasi bahwa Ali adalah pengganti Rasulullah. kata *maula* memiliki banyak arti disesuaikan dengan konteks *statement* tersebut. Istilah ini ini bisa bermakna penolong (*naashir*), anak paman (*ibn al 'am*), orang yang disayangi (*al-mubibb*), tempat kembali (*makaan wa qaraar*), orang yang membebaskan budak dan yang terbebaskan (*al-mu'tiq wa al-mu'taq*), tetangga (*al-jaar*), hubungan pernikahan (*al-shibr*), dan gabungan atau persekutuan (*al-hilf*). Dalam konteks hadis di atas, kata *maula* bisa diartikan sebagai 'penolong.' Dengan demikian hadis Rasulullah bisa diartikan menjadi 'siapapun mengetahui bahwa aku adalah penolongnya (dalam agamanya), maka ia akan tahu bahwa Ali penolongnya.' Ini sebagai informasi Rasul bahwa Ali secara lahir dan bathin membantu agama dan orang-orang mukminin. Kemungkinan kedua bisa diartikan sebagai 'orang yang dicintai,' sehingga hadis itu bisa diterjemahkan dengan 'siapapun mengetahui bahwa aku adalah orang yang dicintainya secara lahir dan bathin, maka ia akan tahu bahwa Ali adalah yang dicintainya.'⁵⁵

Selain itu, sandaran oleh orang-orang Syiah tentang kepemimpinan Ali bin Abi Thalib adalah hadis Rasulullah saw. yang

49 Al Baqillani, *Al Tambid*, hlm. 471-473.

50 Al Baqillani, *Manaqib*, hlm. 33; *al Tambid*, hlm. 442-443.

51 Taqiyah ialah melakukan sesuatu yang tidak ia yakini demi menjaga diri dan kehormatan dari ancaman atau bahaya. Lihat <http://en.wikipedia.org/wiki/Taqiya>.

52 Al Baqillani, *Tambid*, hlm. 450.

53 Hadis riwayat Tirmidzi. di dalam bab manaqib Ali bin Abi Thalib. Lihat *Sunan al Tirmidzi*, ed. Musthafa Muhammad Hussain al Dhahabi, (Mesir: Dar al Hadith, 1999), vol. 5, no. 3713, hlm. 451.

54 Sami N. Makarim, *The Political Doctrine of the Isma'ilis*, (Delmar New York: Caravan Books, 1990), hlm. 29.

55 Al Baqillani, *Tambid*, hlm. 454-456.

menyebutkan bahwa ‘*anta minni binanzilati barun min musa, illa annahu la nabiyyun ba’di*’⁵⁶ (engkau terhadapku seperti Harun kepada Musa, akan tetapi tidak ada nabi setelahku). Orang-orang Syi’ah memahami hadis ini akan adanya hubungan persaudaraan, relasi kenabian dan kekhalifahan kepada ummat Islam. Namun, Rasulullah dan Ali tidak ada persaudaraan dan kenabian, akan tetapi dimaksudkan hal ini dianalogikan sebagai hubungan kepemimpinan. Maka dari itu, siapapun menolak pernyataan ini terhadap Ali ia telah menolak pernyataan Rasulullah. Apabila dipahami bahwa penunjukkan Rasul kepada Ali sebagai letnan pada masa Rasul hidup kemudian dan sepeninggalnya posisi itu tidak lagi pada Ali, maka pemahaman ini salah. Karena tidak ada bukti riwayat pemberhentian Ali sebagai letnannya hingga sampai meninggalnya Rasulullah. Hadis di atas jelas sekali menunjukkan akan legitimasi dan kemuliaan Ali.⁵⁷

Pemahaman ini sama sekali berbeda dengan apa yang dipegang orang-orang Sunni. Al-Baqillani berpendapat bahwa hadis di atas menerangkan tentang kepercayaan Rasulullah terhadap Ali dalam mengurus keluarga Rasul dan mengatur administrasi di Madinah selama beliau tidak ada. Pernyataan yang senada juga pernah disampaikan oleh Rasul sebelum beliau pergi ke perang Tabuk. Hal ini diumpamakan dengan peristiwa Musa ketika menitipkan amanah ummatnya kepada Harun. Akan tetapi, amanat Ali terlepas sekembalinya Rasul ke Madinah untuk mengurus keluarga, administrasi pemerintahan dan ummat.⁵⁸ Maka dari itu, klaim orang-orang Syi’ah dengan hadis inipun batal.

Selain itu, orang-orang Syi’ah juga memahami hadis Rasulullah yang menyebutkan “*anta akhii wa khalaafatii fi ahlii wa Qadi ala diinii...*”⁵⁹ (engkau saudaraku dan penerusku dalam keluargaku, dan Qadhi bagi agamaku...). Al-Baqillani menolak

pemahaman bahwa hadis ini sebagai justifikasi penunjukkan Nabi kepada Ali untuk menjadi pemimpin setelahnya. Ia berpendapat bahwa hadis ini menerangkan tentang Rasulullah meminta dia untuk mengurus keluarganya yakni Fatimah dan anak-anaknya. Adapun kata “*Qadi ala diinii*” dipahami sebagai ungkapan Rasul yang menjadikan Ali untuk menggantikannya semasa beliau pergi ke perang Tabuk.⁶⁰ Al-Baqillani berargumentasi kalaulah kepemimpinan dengan penunjukkan, maka Abu Bakar dan Umar adalah lebih berhak. Karena Rasulullah sendiri telah bersabda “*Abu Bakar dan Umar kepadaku seperti Harun dan Musa.*” Orang-orang Syiah boleh jadi menolak *statement* ini dengan alasan bahwa hadis ini menempati posisi hadis Ahad. Akan tetapi, hal ini menjadi bumerang bagi mereka sendiri yang menggunakan hadis-hadis ahad sebagai landasan adanya penunjukkan Rasul terhadap Ali.⁶¹

Proses Pemilihan

Pembahasan di atas menunjukkan penolakan al-Baqillani terhadap kelemahan sistem penunjukkan dalam kepemimpinan, sebagaimana diyakini oleh orang-orang Syi’ah, dan mengharuskan pemilihan. Ia melanjutkan pembahasan bagaimana proses pemilihan kepemimpinan dilaksanakan. Al-Baqillani berpendapat bahwa pemilihan dilakukan oleh orang-orang tertentu (*afadhil al muslimin*) yang termasuk dalam golongan orang-orang yang dapat dipercaya. Mereka adalah *ahl billi wa al aqd*. Mengenai jumlah anggota ini, al-Baqillani tidak membatasi. Bisa saja hanya satu orang asalkan diantara yang paling berkualitas dari ummat Islam. Karena dalam hal ini, Syariat Islam tidak ada dalil membatasi jumlah *ahl billi wa aqd*.⁶² Dalam hal ini, beliau mengibaratkan seperti adanya akad (kesepakatan) dalam berdagang dan pernikahan.⁶³

Al-Baqillani berpendapat bahwa Allah

56 Hadis riwayat Muslim, dalam bab fadhilah para sahabat, fadhail Ali bin Abi Thalib. Lihat Muhyiddin al Nawawi, *Syarh Shabih Muslim*, ed. Khalil Makmun Syaiba, (Beirut: Dar al Ma’rifah, 2004), vol. 15, no. 6167, hlm. 169.

57 Sami N. Makarim, *The Political Doctrine of the Isma’ilis*, hlm. 29-30.

58 Al-Baqillani, *Tambid*, hlm. 457-459.

59 Hadis diriwayatkan oleh Tabrani, yang dikeluarkan oleh Al-Haithami. Dalam catatan kaki, editor menyebutkan bahwa hadis memiliki kelemahan dalam salah satu dalam sanadnya yaitu Nāsih ibn Abdullah.

60 Yusuf Ibish, *The Political Doctrine of al-Baqillani*, hlm. 90.

61 Al-Baqillani, *Al-Tambid*, hlm. 463.

62 Ibid, hlm. 467; *Manaqib*, hlm. 33.

63 Al-Baqillani, *Al-Tambid*, hlm. 469.

mewajibkan kepada kita untuk berkontrak perjanjian dengan calon pemimpin dan mentaatinya jika proses pemilihan telah dilaksanakan. Dan pemilihan tidak mungkin dilakukan diseluruh daerah, sebagaimana kita ketahui proses pemilihan pada masa khulafaur Rasyidin tidak menghadirkan seluruh orang-orang *abl billi wa aqd* di seluruh kota ummat Islam waktu itu. Yang terjadi pada saat itu adalah bahwa Abu Bakar berkontrak kepemimpinan kepada Umar, dan Umar berkontrak hanya kepada enam orang. Maka dari itu, al-Baqillani berkesimpulan tidak ada jumlah tetap bagi para pemilih dari orang-orang yang berkualitas untuk menentukan kontrak kepemimpinan.⁶⁴ Adapun jumlah pemimpin dalam satu waktu, menurut al-Baqillani, tidak boleh lebih dari satu orang. Seandainya ada yang demikian maka yang sah adalah yang pertama, dan lainnya harus berhenti. Apabila setiap pemimpin mengaku sebagai yang paling pantas, maka diadakan pemilihan ulang untuk menetapkan satu pemimpin. Namun, jika pemimpin-pemimpin yang lain menolak maka harus dianggap sebagai pemberontak dan harus dibunuh.⁶⁵ Selain itu, Apabila seorang pemimpin mendadak meninggal dunia, maka para *abl billi wa aqd* yang lebih dahulu mengetahui kematiannya harus secepatnya memilih penggantinya tanpa harus menunggu kesepakatan ummat. Karena, kerelaan dan kesepakatan mereka tidak menghalangi dipilihnya seorang pemimpin.⁶⁶

Batalnya Kepemimpinan

Dalam perjalanan kepemimpinan, seorang pemimpin bisa saja berbuat kesalahan yang menyebabkan pemberhentian dari jabatannya. Al-Baqillani dalam hal ini menerangkan ada beberapa sebab, diantaranya:

1) karena pemimpin kafir (tidak lagi beriman), meninggalkan shalat dan

hal-hal yang menyebabkannya ke arah tersebut, *fasik* dan *dhalim* mengambil harta negara, dan tidak adil terhadap rakyatnya.⁶⁷

- 2) Adanya penyakit-penyakit fisik dan mental seperti hilangnya akal, gila, tuli, dan umur yang terlalu tua.
- 3) Hilangnya kebebasan seorang pemimpin atau jatuh dalam tahanan musuh.
- 4) Adanya orang lain yang lebih baik dari pemimpin yang ada. Hal ini jika terjadi diawal saat pemilihan kepemimpinan, maka orang yang lebih baik didahulukan untuk dipilih.⁶⁸

Al-Baqillani juga mengutip hadis⁶⁹ yang menerangkan tentang keharusan tunduk dan patuh terdapat pemimpin yang ada meskipun jahat. Yang dilakukan adalah dengan mengingatkan, menasehati dan tidak mentaati perintah-perintahnya yang menyebabkan bermaksiat kepada Allah.⁷⁰ Disamping itu, al-Baqillani juga menerangkan tentang pembatalan kepemimpinan yang tidak sah. Hal ini beliau ibaratkan dengan adanya kesepakatan (*aqd*) dalam perdagangan atau pernikahan yang jika tidak ada kesalahan diantara keduanya maka kesepakatan tidak bisa dibatalkan dengan tanpa sebab.⁷¹

Kesimpulan

Pembahasan di atas menjelaskan bahwa ide politik al-Baqillani merupakan counter konsep kepemimpinan (*Imamah*) yang dipegang kuat oleh orang-Syi'ah pada masa itu dan telah menjadi bagian dari rukun Iman mereka. Berkaitan dengan itu, beliau menyandarkan pendapatnya pada bukti sejarah melalui informasi yang valid (*al Khabar al Mutawatir*) dan informasi dari satu orang (*al Khabar al wabid*). Dari sini, kita bisa mengambil aspek-aspek positif dari sumbang asih pemikiran politiknya yang masih relevan untuk diaplikasi di masa kita saat ini. *Waallahu 'lam.* ■

64 Ibid, hlm. 468; *Manaqib*, hlm. 34.

65 Ibid, hlm. 470; *Manaqib*, hlm. 35-36.

66 Al Baqillani, *Manaqib*, hlm. 34.

67 Namun, ia mengakui ada beberapa kelompok Islam, seperti *ahlul ithbat* dan *ashab al hadith* yang tidak sepakat dengan alasan di atas untuk diberhentikan seorang pemimpin. Mereka lebih sepakat apabila kasus di atas terjadi seorang pemimpin harus diingatkan, dinasehati, dan perintahnya tidak didengarkan hingga dia berhenti dari bermaksiat kepada Allah swt.

68 Al Baqillani, *Al Tambid*, hlm. 478-479.

69 "*isma'u wa ati'u...*" hadis riwayat Tirmidzi. Lihat Abu al Ula Muhammad Abdurrahan ibn Abdurrahim, *Tuhfat al Ahwadhi: Syarh Jami al Tirmidzi*, (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyyah, 2001), vol. 5, no. 1758, hlm. 297.

70 Al Baqillani, *Al Tambid*, hlm. 478.

71 Ibid, hlm. 469.